

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 3 April 2018, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 yang memuat ringkasan dari 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri 6 LHP Keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP Dengan Tujuan Tertentu yang berisi hasil pemeriksaan, yaitu:

1. Opini atas 6 Laporan Keuangan (5 LKPD Tahun 2016 dan 1 Laporan Keuangan Penutup Badan Pengelola Dana Abadi Umat);
2. Simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah; dan
3. Simpulan atas penerapan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

IHPS II Tahun 2017 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD, BLUD, dan BUMN serta badan lainnya.

Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan; pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Khusus pada Kementerian/Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi I terdapat 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yaitu:

1. Pemeriksaan atas Pengelolaan PNBPN, Belanja, dan Aset TA 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen di Jakarta dan Denmark; dan
2. Pemeriksaan atas Pengelolaan PNBPN, Belanja, dan Aset TA 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran di Jakarta dan Iran.

Dalam penyusunan Ringkasan dan Telaahan ini Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengundang para Pakar/Peneliti serta Auditorat Keuangan BPK RI untuk berdiskusi dan kami juga menyajikan dalam bentuk *infografis* yang dapat memudahkan pemahaman tentang hasil pemeriksaan BPK RI yang terperinci dan memuat tentang Penjelasan, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Akibat serta Rekomendasi.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Jakarta, April 2018

DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKKN	i
Daftar Isi	iii

Kementerian Luar Negeri

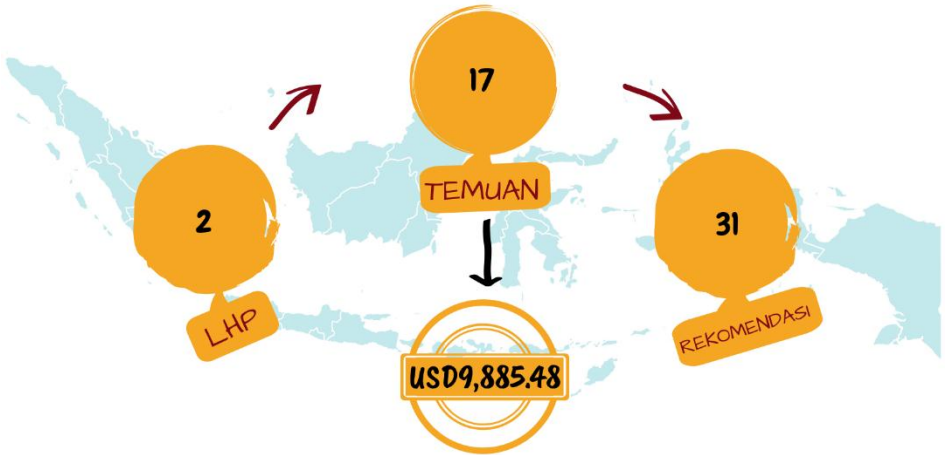
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset TA 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen di Jakarta dan Denmark

Daftar Temuan	2
Pembayaran biaya perjalanan dinas pada KBRI Kopenhagen belum sesuai dengan ketentuan sebesar USD4,091.64	3
Laporan pertanggungjawaban atas Biaya Operasional Kepala (BOK) Perwakilan pada KBRI Kopenhagen belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban	4
Penatausahaan Persediaan pada KBRI Kopenhagen belum sepenuhnya tertib	5
Pengadaan barang dan jasa pada KBRI Kopenhagen belum sesuai ketentuan	7
Kendaraan dinas yang rusak berat belum diusulkan penghapusan kembali kepada pengguna barang	9

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset TA 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran di Jakarta dan Iran

Daftar Temuan	11
Penyetoran PNBP Fungsional KBRI Tehran belum tertib	12
Penatausahaan Tunjangan Sewa Rumah (TSR) pada KBRI Tehran tidak tertib	14
Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada KBRI Tehran belum sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar USD5,793.84	16
Penatausahaan Persediaan pada KBRI Tehran belum dilaksanakan secara tertib	18

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
SEMESTER II TAHUN 2017
KEMENTERIAN LUAR NEGERI



HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
PENGELOLAAN PNBP, BELANJA, DAN ASET
TA 2016 - 2017

PENGELOLAAN PENDAPATAN

Kedubes R.I. Kopenhagen di Jakarta dan Denmark	0 Temuan	Kedubes R.I. Tehran di Jakarta dan Iran	1 Temuan
--	----------	---	----------

PENGELOLAAN BELANJA

Kedubes R.I. Kopenhagen di Jakarta dan Denmark	6 Temuan USD4,091.64	Kedubes R.I. Tehran di Jakarta dan Iran	5 Temuan USD5,793.84
--	-------------------------	---	-------------------------

PENGELOLAAN ASET

Kedubes R.I. Kopenhagen di Jakarta dan Denmark	2 Temuan	Kedubes R.I. Tehran di Jakarta dan Iran	3 Temuan
--	----------	---	----------

SIMPULAN PEMERIKSAAN

Rancangan dan Implementasi SPI atas Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset **belum sepenuhnya efektif** menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

**A1. 01. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Atas Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset TA 2016 dan 2017
pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen
di Jakarta dan Denmark**

Tabel berikut di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai temuan yang diungkap oleh BPK dalam Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 (s.d 30 Juni).

No	Temuan
1	Pembayaran biaya perjalanan dinas pada KBRI Kopenhagen belum sesuai dengan ketentuan sebesar USD4,091.64.
2	Kegiatan representasi pada KBRI Kopenhagen dilaksanakan tidak sesuai ketentuan.
3	Belum seluruh bukti pertanggungjawaban belanja barang dibuat ringkasan terjemahan dalam bahasa Indonesia.
4	Laporan pertanggungjawaban atas Biaya Operasional Kepala Perwakilan pada KBRI Kopenhagen belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban.
5	Penatausahaan Persediaan pada KBRI Kopenhagen belum sepenuhnya tertib.
6	Terdapat peminjaman Kas Besi pada KBRI Kopenhagen tidak mendapat ijin dari Pusat.
7	Pengadaan barang dan jasa pada KBRI Kopenhagen belum sesuai ketentuan.
8	Kendaraan dinas yang rusak berat belum diusulkan penghapusan kembali kepada pengguna barang.

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini adalah **temuan-temuan yang dinilai BPK sebagai temuan signifikan** mengenai rancangan dan implementasi SPI Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset yang belum sepenuhnya efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam tabel nomor 1, 4, 5, 7, dan 8.

**A1. 02. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Atas Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset TA 2016 dan 2017
pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran
di Jakarta dan Iran**

Tabel berikut di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai temuan yang diungkap oleh BPK dalam Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017.

No	Temuan
1	Penyetoran PNBP Fungsional KBRI Tehran belum tertib
2	Penatausahaan Tunjangan Sewa Rumah (TSR) pada KBRI Tehran tidak tertib
3	Evaluasi pegawai setempat pada KBRI Tehran belum dilakukan sesuai ketentuan
4	Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada KBRI Tehran belum sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar USD5,793.84
5	Bukti pertanggungjawaban belanja barang pada KBRI Tehran belum seluruhnya dibuat ringkasan terjemahan dalam Bahasa Indonesia
6	Penatausahaan pelaksana lembur <i>Local Staff</i> pada KBRI Tehran belum sesuai ketentuan
7	Penyajian Neraca dan pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan KBRI Tehran per 30 Juni 2017 belum akurat dan lengkap
8	Penatausahaan Persediaan pada KBRI Tehran belum dilaksanakan secara tertib
9	Peralatan dan Mesin pada KBRI Tehran dalam kondisi rusak berat belum diajukan usulan penghapusan

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini adalah **temuan-temuan yang dinilai BPK sebagai temuan signifikan** mengenai rancangan dan implementasi SPI Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset yang belum sepenuhnya efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam tabel nomor 1, 2, 4, dan 8.